



Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Teddy Rusmawan¹⁾, Supardi Hamid²⁾, Joko Santoso³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta^{1) 2)}
Universitas Jenderal Soedirman³⁾

Kontributor : supardihamid@stik-ptik.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas collaborative governance dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses collaborative yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bekerjasama dan bersinergi untuk melakukan mitigasi dan menanggulangi terhadap daerah yang rawan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses collaborative governance dengan melihat situasi dan kondisi daerah yang terindikasi rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Forum komunikasi yang terjaring dalam masyarakat mulai dari level pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten. Forum yang digunakan koordinasi melalui kelompok tanggap bencana yang selama ini tersebar di masing-masing desa dan kelurahan salah satunya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil dari proses collaborative governance ini mampu berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga secara bertahap pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya mampu menggerakkan kelompok tanggap bencana dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahaya bencana alam dan menjadi edukasi masyarakat pentingnya penerapan mitigasi, antisipasi, kesiapsiagaan sebagai wujud upaya perlindungan dan penanggulangan bencana alam.

Kata kunci: kolaborasi pemerintah; penanggulangan bencana

PENDAHULUAN

Collaborative governance muncul dari pandangan baru dalam megupayakan pembangunan sinergitas antar aktor ataupun stakeholders dalam penyelenggaraan administrasi publik melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah (Lukow, 2013). Strategi ini menjadi salah satu langkah dalam melakukan perbagikan dan pembaharuan terhadap aspek kenegaraan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya oleh pemerintah secara baik dan demokrasi. (Biermann et.al, 2010). Arah dalam pelaksanaan proses *collaborative governance* untuk membangun dan melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan secara sinergi antar pemerintah, masyarakat dan lembaga pemerintahan dan dapat dijadikan sebagai upaya mencapai distribusi kewenangan, pemberdayaan, dan pelayanan administrasi negara melalui penerapan nilai-nilai demokrasi untuk menyatukan hubungan antar pihak (Mardiyanta, 2011). *Collaborative governance* sebagai suatu proses dan struktur yang melibatkan banyak aktor yang muncul dari masyarakat, swasta, NGOs berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan publik dan bentuk tata kelola pemerintahan yang memiliki level perumusan yang sulit dibentuk secara sendiri untuk menentukan tujuan bersama (Guire, 2006). Melalui *collaborative governance* proses pembentukan perumusan dapat dilakukan oleh organisasi dilintas



sektoralnya mulai dari awal proses, pembentukan, pengarahan, memfasilitasi dan mengoprasionalisasikan serta pengawasan terhadap desain kelembagaan organisasi dan dapat juga sebagai penyelesaian masalah bersifat publik melibatkan semua pihak yang terlibat didalamnya (Jung et al., 2009).

Konsep *collaborative governance* memposisikan tiga aktor komponen dasar yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi perpaduan komponen yang secara komperhensif akan mampu mendukung dalam pelaksanaan administrasi publik, serta mendukung secara lebih khusus pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, proses *collaborative governance* adalah suatu kebijakan dalam memberikan kewenangan secara desentralisasi dalam menjalankan kebijakan secara institusional (Skłodowska, 2013). Pendekatan *collaborative governance* dalam pelaksanaannya, meliputi tiga domain utama yaitu negara atau pemerintah, lalu masyarakat (*civil society*), dan juga sektor swasta (*privat*). Kemunculan model *collaborative governance* berangkat dari perkembangan paradigma yang diinisiasikan untuk menggantikan istilah *government* yang merujuk kepada pemegang otoritas secara penuh dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan administrasi kenegaraan ke arah *collaborative governance* yang menitikberatkan pada kombinasi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (Biermann et.al, 2010). Pusat perhatian utama dari *collaborative governance* adalah adanya perbaikan kinerja serta kesempatan yang diberikan oleh para aparatur yang lebih mengedepankan upaya keterlibatan publik. *Collaborative governance* diimplementasikan dalam beberapa tahap, pertama yaitu sebuah proses baru dalam pemerintahan, kedua perubahan aturan, dan ketiga perubahan pada peran masyarakat secara demokratis dan keempat adanya keterlibatan pihak swasta dalam mencapai tujuan suatu kebijakan (Plattner, 2013). Artinya, kemampuan pemerintah dalam menumbuhkan serta berkomitmen menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui strategi *collaborative governance* mendukung terciptanya efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, baik dalam pembangunan, ekonomi maupun dalam pelayanan publik (Peters 2011). Berjalannya waktu seiring dengan banyaknya kebutuhan manusia yang semakin meningkat, ketergantungan manusia tentu menjadi potensi alam yang menjadi faktor penyebab dari kerusakan alam jika tidak dilakukan secara benar (Priambodo, et.al. 2020). Hal ini menjadi dasar bahwasanya dengan hal tersebut menjadikan pemicu awal terjadinya kerusakan alam yang menimbulkan berbagai dampak.

Salah satu upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan penerapan *collaborative governance* dalam hal penanggulangan bencana alam yang rawan terjadi di berbagai wilayah yang dapat menimbulkan berbagai dampak kerugian baik dari materil maupun non materil dan menjadi permasalahan publik yang secepatnya diantisipasi dan diselesaikan secara sistematis. Permasalahan yang mengganggu kenyamanan hidup diperlukan kebijakan pemerintah mengentai penanggulangan bencana alam sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Ahdi, Didi, 2015). Terjadinya bencana alam tidak serta direncanakan dan tidak mengerti kapan akan terjadi namun datang secara tiba-tiba dan sangat diperlukan langkah-langkah strategi melalui antisipasi setiap waktu secara komperhensif (Wandi, Didi et.al., 2019).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) selama tahun 2021 telah terjadi 5.402 kejadian varian bencana alam dan 99,5% dari kejadian tersebut sepanjang tahun 2021 merupakan bencana yang disebabkan dari hidrometeorologi. Hampir sebagian besar wilayah dari 34 provinsi negara Indonesia menunjukkan terjadinya bencana alam tentu besar kemungkinan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya langkah-langkah strategi yang tepat dalam menganggulangi bencana alam tersebut supaya tidak terulang kembali diberbagai daerah. Melalui model *collaborative governance* dari kebijakan pemerintah dapat mendorong percepatan penanggulangan dalam mengantisipasi dan mitigasi terjadinya bencana alam yaitu dengan melakukan kolaborasi antar stakeholders seperti ini mulai dari pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta yang secara bersama-sama untuk mencegah bencana alam yang terjadi

secara bertahap. (Sumber: BPBD 2021). Berikut gambar indeks kejadian bencana alam diberbagai daerah dan provinsi dinegara Indonesia sepanjang tahun 2021.

Dari data di atas, maka dapat diketahui terkait jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi sebanyak 1.794 kejadian, 1.577 kejadian cuaca ekstrem, 1.321 bencana tanah longsor, 576 bencana kebakaran hutan dan lahan, 91 gelombang pasang dan abrasi, 24 gempa bumi, 15 kekeringan dan 1 erupsi gunung api.



Foto : infografik kejadian bencana sepanjang tahun 2021 (BNPB)

Dampak dari kejadian tersebut adalah 728 orang meninggal dunia, 87 orang hilang, 14,915 luka-luka, 7.630.692 menderita dan mengungsi, 158.658 rumah rusak, 4.445 fasilitas umum mengalami kerusakan, 664 kantor rusak dan sebanyak 505 jembatan rusak. Banyaknya kejadian seperti ini perlu menjadi perhatian lingkup nasional, berbagai upaya antisipasi telah dilakukan bertahun-tahun namun belum sepenuhnya bisa menanggulangi bencana alam diberbagai daerah yang menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat secara luas dan merata. Berikut indeks kejadian bencana alam tertinggi di provinsi negara Indonesia pada tahun 2021.

Tabel 1. Indeks Kejadian Bencana Alam Tertinggi Di Provinsi Negara Indonesia Pada Tahun 2021

No	Provinsi Indonesia	Jumlah Bencana
1.	Jawa Barat	1.358 kejadian
2.	Jawa Tengah	622 kejadian
3.	Jawa Timur	366 kejadian
4.	Aceh	279 kejadian
5.	Kalimantan Selatan	272 kejadian

Sumber: BPBD Tahun 2021

Dari data di atas, maka dapat diketahui terkait jumlah kejadian tersebut terdapat lima provinsi tertinggi yang mengalami kejadian bencana adalah Provinsi Jawa Barat 1.358 kejadian variasi bencana, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 622 kejadian bencana, Provinsi Jawa Timur sebanyak 366 kejadian bencana, kejadian bencana sebanyak 279 Provinsi Aceh dan sebanyak 272 kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya Secara umum perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana

dan pada tahun 2021 tercatat mencapai sebanyak 5.402 bencana atau mengalami kenaikan 16,2% kejadian bencana disepanjang satu tahun terakhir. Bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan terjadinya variasi bencana alam yang tertuju pada salah satu kabupaten yaitu tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri memiliki 18 kecamatan dan 286 desa yang tersebar. Terdapat sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian serius dan khusus terhadap daerah yang rawan bencana alam terutama wilayah yang dominan terjadinya bencana tanah longsor. Antara lain wilayah di Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, sebagian wilayah Kaligondang, Mrebet dan Kutasari.

Bencana tanah longsor secara umum disebabkan adanya peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa tanah yang juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan pemicu. Kerawanan bencana yang terjadi di berbagai kecamatan yang disebutkan diatas di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Rembang di Desa Karangbawang menjadi salah satu yang menjadi wilayah rawan terjadinya bencana alam yaitu bencana tanah longsor. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemerintah karena dampak yang ditimbulkan adanya bencana alam tersebut dapat mengakibatkan dampak kerugian signifikan baik dari materil maupun non materil yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya dampak yang secara umum merugikan tentu diperlukan langkah yang tepat dalam membentuk strategi mitigasi dan tanggap bencana untuk meminimalisir bencana yang terjadi dan dampak ditimbulkannya. Hal ini dilakukan secara masif karena keselamatan hidup masyarakat dan mengurangi resiko bencana menjadi prioritas utama dan kewajiban pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah purbalingga dalam lingkungan masyarakat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya dalam meningkatkan peran seluruh organisasi dalam membantu penanggulangan bencana alam di seluruh kecamatan terutama Kecamatan Rembang di Kabupaten Purbalingga yang kerap terjadi bencana alam. Berikut elemen-elemen yang turut serta membantu dan menyelamatkan dalam penanggulangan Bencana alam sebagai upaya mitigasi dan tanggap bencana alam:

Tabel 2. Pihak kolaborasi penanggulangan bencana alam

No	Pihak yang terlibat collaborative penanggulangan bencana alam
1.	Pemerintah Daerah
2.	Kelompok Masyarakat
3.	Dinas-dinas Kabupaten Purbalingga
4.	Praktisi dan Basarnas
5.	Organisasi Masyarakat
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	TNI dan Polri

Beberapa elemen yang turut serta dalam keletrlibatan penanggulangan bencana alam mulai dari perangkat daerah, kelompok masyarakat, dinas-dinas Pemerintah daerah, praktisi dan Basarnas, Organisasi masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri untuk bersama-sama bekerjasama dan membangun sinergi dalam upaya penanganan bencana alam secara bertahap. Secara umum dengan bertambahnya frekuensi dan intensitas bencana setiap tahun, pengetahuan masyarakat tentang potensi resiko menjadi mutlak untuk ditingkatkan. Salahsatunya melakukan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana alam di Desa Karanbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagai wujud untuk mengurangi resiko bencana dan keselamatan hidup masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang administrasi publik yang dilaksanakan menggunakan pendekatan konstruktif (Ashworth et al., 2019; B.Miles et al., 2014; Ospina et al., 2018) menggunakan desain *Descriptive Research* dan *Explanatory Research* dalam proses



collaborative governance dalam upaya penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. (B.Miles et al., 2014; Creswell & Creswell, 2018). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan lengkap (Morgan, 2017). Adapun informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* di mana informan yang memiliki kapasitas dan dianggap sebagai informan kunci (Nathan & Scobell, 2012; Schneider, 2008). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (B.Miles et al., 2014) dengan desain eksplanatori (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance

Kolaborasi berasal dari kata *co* dan *labor* yang berartikan sebagai penggabungan tenaga yang sifatnya untuk mencapai tujuan secara bersama dan digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya di lintas batas, sektor dan suatu hubungan (Conlan, 2010). Menurut Zadek dalam O'Brien *collaborative governance* merupakan kemitraan yang bersifat publik-swasta yang didasarkan pada inisiasi kolaborasi antara negara dan non negara, aktor komersial dan nirlaba yang telah muncul untuk berpartisipasi dalam suatu paradigma (O'Brien, 2012). Kolaborasi juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan secara bersama-sama (O'Brien, 2012), sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan suatu hubungan kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama salah satunya keuntungan. Dengan hal itu, kepuasan dari didapatkan setiap pihak dalam suatu hubungan kolaborasi melalui prinsip karakteristik dari sebuah proses kolaborasi yang mengarahkan mereka pada hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Gray, 2004).

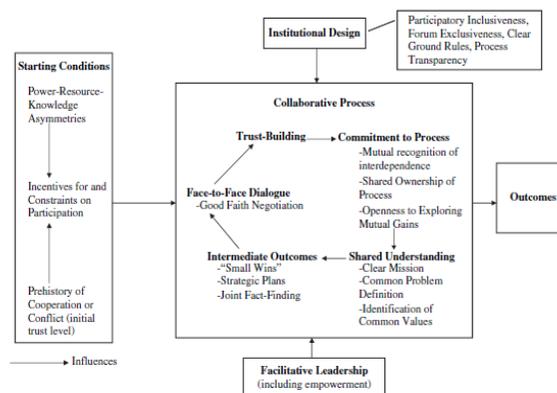
Governance merupakan kerangka konsep filosofis dari sebuah teori dan analisis yang dibangun sebagai landasan paradigma manajemen pemerintahan. Konsep *governance* bukan hanya ditunjukkan pada orientasi internal melainkan pada aspek eksternal yang mewujudkan kemakmuran, keadilan bagi masyarakat (Budiyaji, 2011). Sedangkan *governance* mengandung arti sebagai nilai dan kemampuan dalam menjunjung pencapaian tujuan nasional dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pemerintahan. *Governance* dalam perspektif administrasi publik adalah proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi guna merumuskan proses kebijakan publik dan aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan (Irawan, 2017). Sehingga saat ini *governance* menjadi salah satu strategi di berbagai negara untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kenegaraan, yang kemudian menjadi cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*governance*). Sehingga penggunaan *governance* lebih diarahkan dalam membangun pemerintahan yang secara luas mampu melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan secara sinergi baik dengan masyarakat maupun lembaga swasta. Dan bertujuan mencapai distribusi kewenangan, pemberdayaan, dan pelayanan administrasi negara (Mardiyanta, 2011).

Pelaksanaan *governance* sangat memerlukan fokus dan lokus yang mana kekuasaan bukan hanya terletak pada pemerintah saja, akan tetapi masyarakat atau rakyat juga memiliki kekuasaan dalam ikut serta penyelenggaraan pemerintahan (Rahmatunnisa, 2011). *Governance* muncul sebagai wacana dan pembahasan yang menjadi ciri dalam sistem administrasi publik. Paradigma *governance* dalam memberikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi memiliki keterkaitan satu sama lain (Hasyim, 2014). *Governance* dalam pelaksanaannya, meliputi tiga domain utama yaitu negara atau pemerintah, masyarakat atau *civil society*, dan sektor swasta atau *privat*. Kemunculan *governance* merupakan paradigma yang digunakan untuk menggantikan *government* yang merujuk pada pemegang otoritas politik, sosial, ekonomi, dan administrasi kenegaraan (Plattner, 2013). Istilah *governance* secara khusus menggambarkan adanya perubahan peran pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan dari negara kepada masyarakat. Pemerintah lebih adaptif dengan peran kekuasaan, norma, pengetahuan yang mampu membagi kewenangan secara adil dan setara (Plattner, 2013). Pusat perhatian utama dari *governance* adalah adanya memperbaiki kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para aparatur. *Governance*

diimplementasikan dalam beberapa tahapan, pertama sebuah proses baru dalam pemerintahan, kedua perubahan pada aturan, dan ketiga perubahan pada peran dan posisi masyarakat secara demokratis (Mardiyanta, 2011).

Dalam perspektif *collaborative governance*, locus administrasi publik bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintah, akan tetapi meliputi semua lembaga yang mempunyai misi utamanya adalah mewujudkan *publicness*. Konsep publik dalam administrasi publik bukan lagi diartikan sebagai kelembagaan akan tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai *publicness* (Singh, 2014). Dengan perspektif *governance* pelaksanaan administrasi publik akan lebih dinamis dan lebih relevan dalam menjelaskan berbagai masalah publik yang semakin kompleks. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi publik terkait dengan pendekatan *governance* Menurut (Singh, 2014). ada empat poin yaitu : Adanya dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menuntut kemampuan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan masyarakat dan pasar semakin mampu mendorong kebutuhan masyarakat. Sehingga sebagian kebutuhan masyarakat banyak diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah, globalisasi ekonomi yang semakin kuat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan perbaikan pelayanan publik diarahkan untuk mengurangi peran birokrasi yang selama ini dianggap inefisiensi. Dan mengurangi peran pemerintah dalam kegiatan yang sebenarnya bisa diselenggarakan oleh masyarakat, asosiasi dengan menggunakan mekanisme pasar yang bertujuan memperbaiki efisiensi nasional. Berikut merupakan pergeseran antara *government* ke arah *collaborative governance* ditinjau dari pengertian, sifat hubungan, komponen, pemegang peran, efek yang diharapkan, dan hasil yang diharapkan.

Proses *collaborative governance* merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar berbagai pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai secara umum yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (*Starting Conditions*), kepemimpinan fasilitatif (*Facilitative Leadership*), dan desain kelembagaan (*Institutional Design*), dan indikator proses *collaborative governance* seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman pemikiran bersama dan hasil capaian tujuan sementara di mana masing-masing aspek berupaya untuk memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami suatu permasalahan yang di hadapi terkait dengan upaya melakukan proses mitigasi dan penanggulangan bencana alam di daerah yang terindikasi terhadap rawan kebencanaan sekitar daerah Kabupaten Purbalingga.



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* (Chris Ansell and Alison Gash, 2008)

Proses *collaborative governance* merupakan pendekatan atau model yang mencoba

menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (*Starting Conditions*), kepemimpinan fasilitatif (*Facilitative Leadership*), dan desain kelembagaan (*Institutional Design*), di mana masing-masing aspek berupaya memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami permasalahan yang dihadapi.

Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*)

Menurut (Ansell dan Gash, 2008) Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi, dialog bertatap muka (*face to face dialogue*), lalu membangun kepercayaan (*trust building*), juga komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediat outcomes*). Dari hasil penelitian terkait dengan proses *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga dapat diketahui dari masing-masing aspek dalam proses *collaborative*. Pertama proses *face to face dialog* atau dialog tatap menjadi hal yang sangat penting, dimana pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka harus mampu melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kompetensi bidang dan keahlian terhadap masalah yang dihadapi . Berikut adalah penjelasan terkait dengan pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka, dan intensitas dialog antar *stakeholder* yang berlangsung selama proses *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang yang dilakukan berbagai kegiatan dengan beberapa tahap. Pertama adanya forum diskusi lintas sektor dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini dinas sosial, BPBD, Organisasi masyarakat, Basarnas praktisi, akademisi, TNI dan Polri. Kedua, adanya sosialisasi dan diskusi secara edukasi untuk melakukan pemetaan titik pedesaan yang memiliki angka rawan bencana alam kemudian melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan setempat dan berbagai pihak yang turut serta dalam penanggulangan bencana alam untuk memperoleh informasi secara akurat. Sehingga dengan adanya dialog dan komunikasi akan mampu mempermudah dalam memperoleh informasi dan mampu menemukan berbagai alternatif yang mampu dalam tangap bencana yang terjadi dan menanggulangi bencana alam secara berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga.

Kedua, proses *trust building* merupakan tahapan yang berupaya membangun kesamaan visi dan orientasi yang menumbuhkan rasa saling percaya antar pihak dalam penanganan suatu permasalahan yang di hadapi. Upaya dalam membangun kepercayaan diantara *stakeholder* yang terlibat menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam proses *collaborative*. Artinya, para pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sama-sama memiliki kepercayaan yang sama. Secara umum di Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang proses *collaborative governance* dalam upaya mitigasi dalam penggulungan bencana alam sudah terjalin kepercayaan antar pihak memiliki kesamaan terhadap penolongan dan penyelamatan ketika peristiwa bencana terjadi. Hal ini dikarenakan dari awal proses upaya pananggulangan bencana alam dalam lingkup Kabupaten Purbalingga pihak pemerintah sudah melibatkan berbagai pihak baik dari pihak masyarakat dan swasta. Selain itu, adanya koordinasi satu dengan yang lain csecara rutin dilakukan dari level desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten sudah berjalan dengan baik. Proses *collaborative governance* ini yang sama-sama dilakukan dengan prioritas bertujuan untuk menciptakan masyarakat Purbalingga yang terlindungi kehidupannya dan mampu melakukan mitigasi dan tanggap bencana seiring dengan peristiwa bencana alam yang terjadi dengan tidak sengaja tanpa menguntungkan semua pihak. Selain itu, adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak yang lainnya dalam penanggulangan bencana alam berdampak pada dukungan oleh semua pihak masyarakat secara bersama-sama bergotong-royong supaya dapat mengedalikan dampak bencana alam yang ditimbulkannya.



Ketiga, *commitment to process* merupakan proses yang harus dilaksanakan dalam proses *collaborative governance*. Komitmen menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan dari setiap program pemerintah untuk mendapat dukungan baik masyarakat maupun para *stakeholders*. Komitmen yang dibangun dalam proses *collaborative* bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai agenda kebijakan pemerintah. Dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga, dilakukan dari mulai awal pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta dengan adanya komitmen dalam bentuk MOU antara pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pihak-pihak lainnya guna mengurangi potensi resiko kerugian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk kelompok masyarakat, pemerintah melalui kelompok tanggap bencana yang ada di desa dan kelurahan memberikan surat tugas atau SK secara legal, sehingga pelaksanaan program penanggulangan bencana alam diantisipasi secara sistematis dan komitmen dari masing-masing pihak.

Keempat, *shared understanding* merupakan upaya dalam membangun rasa saling memahami di antara aktor/pihak yang terlibat dalam proses *collaborative*. Sikap saling memahami ini dilakukan untuk saling memberikan keterbukaan informasi, kesamaan visi untuk mencapai alternatif dari masalah yang dihadapi. Dengan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga, terlihat dari masing-masing pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta saling memahami peran keterlibatannya dan tujuan yang akan diwujudkan. Hal ini, yang menjadi daya dukung keterlibatan masyarakat dan swasta untuk saling membantu pemerintah daerah yang tertuju pada pedesaan dalam menangani peristiwa bencana alam yang di hadapi. Penanggulangan bencana alam ini tidak bisa hanya diselesaikan atau ditangani oleh pemerintah saja, tetapi pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dengan adanya kesadaran kepedulian resiko dampak bencana alam itu langsung terbangun sikap saling memahami yang selama ini sudah berjalan dalam penanggulangan bencana alam.

Kelima, *intermediate outcomes* merupakan tahapan untuk mengetahui hasil sementara yang dilakukan dalam proses *collaborative governance*. Hasil sementara ini memberikan informasi terkait capaian yang sudah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan dan Penanganan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Hasil sementara dalam penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Purbalingga sejauh ini sudah terjalin dan terbentuk melalui alur komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahayanya bencana alam yang terjadi. Adanya forum-forum yang dilakukan di semua level dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, mengurangi resiko dampak peristiwa bencana alam dan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Adanya dukungan dana dari berbagai pihak sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui Sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk dalam meningkatkan kesadaran pentingnya edukasi, pengetahuan dan mitigasi disetiap pedesaan melalui kelompok masyarakat. Masyarakat melalui program sosialisasi dan pembentukan kelompok tanggap bencana yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga sudah membentuk gerakan antisipasi dan penerpaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang juga di dukung oleh pemerintah kabupaten dan berbagai unsur *stakeholders*. Keenam, dalam proses *collaborative governance* berupaya untuk mengukur keberhasilan atau hasil yang dikenal dengan *outcomes*. Hasil dari proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana alam terhadap daerah yang rawan terjadinya bencana alam di Kabupaten Purbalingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana dan pemerintah cukup masif dalam melakukan gerakan kepedulian terhadap pentingnya edukasi mitigasi dan tanggap bencana Purbalingga bebas dari dampak terjadinya bencana alam.

SIMPULAN DAN SARAN

Proses *collaborative governance* dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjadi agenda



prioritas bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama bersinergi mengurangi resiko bencana alam yang terjadi dari berbagai aspek dan mencegah bencana alam secara berkelanjutan. Dalam proses kolaboratif yang dilakukan sudah berjalan dengan skema rencana yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, pertama pemerintah secara terbuka melibatkan unsur masyarakat dan swasta dalam awal penyusunan program kerja mitigasi dan penanggulangan bencana setiap desa dalam satunya Desa Karangbawang Kecamatan Rembang di Kabupaten Purbalingga. Kedua, pemerintah selalu berupaya memberikan fasilitas dan keterbukaan akses informasi dalam upaya pemetaan dan langkah strategis dari level pemerintah desa, kelurahan, kecamatan agar terencana secara sistematis. Ketiga, adanya forum komunikasi dan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam mitigasi dan penanggulangan bencana secara luas di Kabupaten Purbalingga. Keempat, pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang turut serta membantu dalam penanganan bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Didi. (2015). Perencanaan penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Resiko. Reformasi: ISSN 2088-7469 (paper) ISSN 2407-6864. Vol. 5, No. 1
- Ansell, Chris, and Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, Published by Oxford University Press.
- Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie, G. (2019). Theorizing from Qualitative Research in Public Administration: Plurality through a Combination of Rigor and Richness. Journal of Public Administration Research and Theory, 29(2). <https://doi.org/10.1093/jopart/muy057>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Biermann et.al. (2010). Earth system governance: a research framework (Conceptualizing earth system governance). Environ Agreements 10:277–298. Institute for Environmental Studies, Department of Environmental Policy Analysis, VU University, Amsterdam, The Netherlands. Hal 279-280.
- Budiaji. (2011). Good Governance dalam Pemerintah Daerah.Vol. 28, No. 2. Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Hal 201.
- Conlan. (2010). Administration and Governance in the Compound Republic: Martha Derthicks Contribution To The Study of American federalism. Social Science Database pg. 811. Hal 815.
- Craft, Jonathan dan Michael Howlett. (2012). "Policy Formulation, Governance Shifts and Policy Influence: Location and Content in Policy Advisory Systems". Journal of Public Policy. Vol. 32 (2): 79-98.
- Creswell, & Creswell. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Fawcett, Paul, and Marsh, David. (2014). epoliticisation, governance, and political participation. Policy & Politics, Vol 42, No 2,. 171-88, Policy Press.
- Gray, Barbara. (2004). Collaborating: Finding common ground for multi-party problems. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Hasyim, Dardiri. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah (Good Governance Sebuah Konsep). Disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis UNIBA Surakarta ke 31. Hal 28
- Hardiyanto, Sigit. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. Jurnal Interaksi Volume 3 No. 1
- Jordan, Andrew et.al. (2005). The Rise of 'New' Policy Instruments in Comparative Perspective:



- Has Governance Eclipsed Government. *POLITICAL STUDIES*: Vol 53, 477–496. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D. & Tung, S. Y. (2009). Collaborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policymaking and Service Delivery. *International Review of Public Administration*
- Lukow, Seftian. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado. Vol 1 No 5. Universitas Sam Ratulangi. Hal 134-135.
- Mardiyanta, Antun. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya (Pergeseran Orientasi Ilmu Administrasi Publik dari Government ke Governance). Volume 24, Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
- Mc Guire, M. (2006). Collaborative Public Management. Assessing What We Know and How We Know it. *Public Administration Review*, Vol. 66, Special Issue: Collaborative Public Management.
- Morgan, D. L. (2017). Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*. <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- O'Brien, M. (2012). Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process. Published by the ministry for the environment.
- Ospina, S. M., Esteve, M., & Lee, S. (2018). Assessing Qualitative Studies in Public Administration Research. *Public Administration Review*, 78(4), 593–605. <https://doi.org/10.1111/puar.12837>
- Plattner, Marc F. (2014). Reflections on “Governance”. *Journal of Democracy* Volume 24. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Peters, B. Guy. (2011). Global Financial Crisis, Public Administration and Governance: Do New Problems Require New Solutions? *Public Organiz Rev* 11:13–27. Department of Political Science, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, USA.
- Priambodo, Agung. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *Persepaktif*, 9 (2): 307-313
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahmatunnisa. (2011). Analisis Kritis Good Governance. Program Studi Pemerintahan Dan Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran. Hal 7-8.
- Ronquillo, John C. (2011). American Indian Tribal Governance and Management: Public Administration Promise or Pretense? The University of Georgia. Hal 286.
- Schneider, B. (2008). Review of Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In *European Psychologist* (Vol. 13, Issue 2, pp. 152–153).
- Singh, Sarinda. (2014). Religious Resurgence, Authoritarianism, and “Ritual Governance”: Baci Rituals, Village Meetings, and the Developmental State in Rural Laos. *The Journal of Asian Studies* Vol. 73, No. 4. The Association for Asian Studies, Inc., University of Queensland, Australia.
- Wandi, Didi. (2019). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, *Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>